

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Muhammad Dzakir, dalam penelitiannya yang berjudul, “Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Mengemukakan bahwa PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai peranan yang penting terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah, program yang berperan langsung dalam peningkatan UMKM ini adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP), kendala yang dihadapi yaitu kurangnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti musyawarah antar desa, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pinjaman dari PNPM Mandiri pedesaan.¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus dan tinjauan penelitian. Penelitian sebelumnya oleh Muhammad Dzakir berfokus pada bagaimana peran program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah di kecamatan bangkinang seberang, sedangkan penelitian ini berfokus untuk menjelaskan bagaimana

¹ Muhammad Dzakir, “Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Riau: Jurusan ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kupa Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian selanjutnya oleh I Gusti Putu Putra dan Made Kembar Sri Budhi, dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, menjelaskan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Abiansemal tergolong sangat efektif, dan berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan perbulan rumah tangga dan peningkatan kesempatan kerja rumah tangga.² Penelitian tersebut lebih dalam membahas mengenai efektivitas dan dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja rumah tangga sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan bagaimana pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kupa perspektif Ekonomi Islam.

Adapun Penelitian oleh Sutinah, yang berjudul “Evaluasi Kegiatan Pinjaman Bergulir Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mpd) di Kota Palembang (studi kasus di tiga kelurahan). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM tidak efektif karena tidak seluruhnya pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha, sebagian besar digunakan peminjam untuk

² I Gusti Putu Putra dan Made Kembar Sri Budhi, “Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, ISSN: 2337-3067, Universitas Udayana 4.30 (2015).

menanggulangi keperluan pada saat dana cair.³ Penelitian tersebut cenderung berfokus pada evaluasi pinjaman bergulir pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di kota Palembang. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus untuk mengetahui pemanfaatan dari Pogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kupa perspektif Ekonomi Islam.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, dengan imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan.⁴ Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, atau cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat atau memiliki nilai, atau suatu perolehan serta pemakaian hal-hal yang berguna, baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatkan sesuatu. Dalam penelitian ini pemanfaatan yang dimaksud adalah tingkat pemanfaatan dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kupa.

Menurut J. S Badudu, Pemanfaatan merupakan kegiatan, proses, serta hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.⁵ Kegiatan adalah sebuah aktivitas,

³ Sutinah, “Evaluasi Kegiatan Pinjaman Bergulir Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mpd) di Kota Palembang (studi kasus di tiga kelurahan)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 16, No. 01, 2016, h.68.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 710.

⁵ Muhammad Syawal, D. Silangen dan Antonius Tore, “Pemanfaatan Jasa Layanan Koleksi Buku Tandon (Reservation) Oleh Mahasiswa di UPT Perpustakaan UNSRAT”, *Jurnal Acta Diurna*, Vol V, No 5, 2016, h. 4.

usaha dan pekerjaan, Adapun kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kemampuan dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lain serta bentuk dari pengawasan dan pengendaliannya, Proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.⁶

Proses yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan dengan berbagai pentahapan, baik dalam pentahapan bagian-bagiannya maupun dalam periodisasinya. Selanjutnya adalah hasil, yaitu suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional.⁷ Dalam penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana hasil yang diperoleh dalam pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan. Dengan menggunakan teori ini, diharapkan dapat mengukur tingkat pemanfaatan. Dalam hal ini yaitu Pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kupa Perspektif Ekonomi Islam.

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Simpan adalah suatu proses perjanjian untuk mengelola asset seseorang dimana pihak pengelola akan memberikan sejumlah return kepada pemilik asset, tingkat return yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan antara pihak pemberi dan pihak pengelola.⁸ Simpan pinjam adalah simpanan yang

⁶ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi dan Administrasi*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 20.

⁷ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 44.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 92.

dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dengan mengajukan permohonan pinjaman.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan serta meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah program nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat⁹. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.¹⁰

Visi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yaitu: ¹¹

⁹ Panduan Teknis Operasional, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Pedesaan)*, Republik Indonesia, 2013, h. 4.

¹⁰ Panduan Teknis Operasional, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Pedesaan)*, h. 2.

¹¹ Raisa Betsaida Hutabarat, "Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMd)", *Universitas Riau*, Vol. 3, No.2, 2016, h 4.

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
- e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Strategi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yaitu antara lain pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, desentralisasi anggaran di tingkat desa, pendamping masyarakat, dan pengembangan kapasitas pemerintah lokal.

Komponen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yaitu pengembangan masyarakat, bantuan langsung masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal seperti seminar, pelatihan, dan lokakarya, dan terakhir bantuan pengelolaan dan pengembangan program. Dengan ruang lingkup meliputi penyediaan dan perbaikan sarana lingkungan pemukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya, penyediaan sumber daya keuangan melalui dan bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, selain itu juga kegiatan terkait peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.¹²

¹² Panduan Teknis Operasional, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perdesaan)*, h. 8.

Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri¹³

a. Tujuan Umum:

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- 4) Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- 6) Menorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa.
- 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

¹³ Modul Pelatihan Badan Kerjasama Antar Desa, Kabupaten Barru, Tahun anggaran 2012. h 6.

Prinsip dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yaitu meliputi:¹⁴

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia, artinya masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b. Otonomi, yaitu masyarakat memiliki hak dan juga kewenangan mengatur diri sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negative dari luar.
- c. Desentralisasi, yaitu memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sectoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin, yaitu segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- e. Partisipasi, yaitu masyarakat berperan secara aktif dalam tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.
- f. Kesenjangan dan keadilan gender, yaitu masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.
- g. Demokratis, yaitu masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

¹⁴ Panduan Teknis Operasional, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Pedesaan)*, h. 6.

- h. Transparansi dan Akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative.
- i. Prioritas, yaitu masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan manfaat untuk pengentasan kemiskinan.
- j. Keberlanjutan, bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

3. Peningkatan

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, kualitas maupun kuantitas, selain itu pencapaian dalam proses, ukuran, sifat hubungan dan sebagainya.¹⁵ Peningkatan dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negative berubah menjadi positif, sedangkan hasil dari suatu peningkatan dapat ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peningkatan merupakan kemajuan atau upaya untuk menambah kualitas maupun kuantitas, atau dapat dikatakan sebagai penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.

¹⁵ Adi S, *Pengertian Peningkatan Menurut ahli*, www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/ , diakses pada 07 Mei 2021.

¹⁶ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu & Aplikasi Pendidikan* (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2007), h. 24.

Adapun dalam penelitian ini Peningkatan yang dimaksud adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan masyarakat, yang dimulai dari Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1993, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 1998, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tahun 1999, dan pada tahun 2007 diluncurkanlah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang merupakan pengembangan yang lebih luas dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era sebelumnya.¹⁷

4. Kesejahteraan Masyarakat

a. Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan secara harfiah mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu tentang suatu hal yang menjadi ciri utama dari pengertian tersebut. Kesejahteraan bermula dari kata sejahtera, berawalan kata ke dan berakhiran kata an. Sejahtera berarti aman Sentosa Makmur, atau selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Dalam artian luas, kesejahteraan dikatakan sebagai rasa aman dan tidak terganggu dari hal apapun, kesejahteraan merupakan impian semua orang dalam hidupnya, kesejahteraan merupakan tujuan manusia untuk kehidupan yang lebih baik, yang erat kaitannya dengan sosial.¹⁸

Definisi kesejahteraan dalam konsep modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan,

¹⁷ Ahmad Suprastiyo dan Musta'ana, "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Bojonegoro", Vol.7, No. 2, 2007, h. 2.

¹⁸ Fadhil Nurdin. *Pengantar studi Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Angkasa, 1990), h. 27.

pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹⁹

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat yang lebih baik yang didalamnya mencakup unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, Pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya.

b. Kesejahteraan dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan pekerjaan maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses

¹⁹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Geema Insani Press, 2005), h. 24.

transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.²⁰

Konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang telah mengurangi jumlah uang yang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam.²¹

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam QS. Quraisy / 106 : 3-4,

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾
﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾﴾

Terjemahnya:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-qur’an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam QS. an-nisaa’ / 4 : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

²⁰ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 136.

²¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 21.

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan bertawakkal kepada Allah SWT.

Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan dalam QS. An Nahl / 16 :

97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Berdasarkan ayat tersebut diatas, kehidupan yang baik adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah SWT disertai memakan dengan rizki yang halal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental dengan bertakwa kepada Allah SWT, berbicara dengan jujur dan benar, serta memperoleh kehidupan yang lebih baik, artinya kehidupan yang baik merupakan kehidupan yang aman, nyaman, damai, tentram, memiliki rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dan kesulitan.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat secara umum merupakan tujuan Negara Republik Indonesia, hal tersebut secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara”. Kesejahteraan masyarakat juga dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat yang ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat Kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat Pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.²²

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat, yaitu merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk itu, ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seseorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spritualnya.²³ Seperti kebutuhan material yaitu pendapatan yang akan mewujudkan kebutuhan sandang, pangan, papan dan juga

²² Ahmad Suprastiyo dan Musta'ana, “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Bojonegoro”, Vol.7, No. 2, 2007, h. 2.

²³ Siti Utami Nurfadillah, “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program UP2K-PKK di Desa Kayuambon Lembang”, Vol 2, No 1, 2019, h. 92.

kesehatan, serta kebutuhan spiritual seperti Pendidikan, keamanan, serta ketentraman hidup.

d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan dan kesehatan agar dapat hidup layak serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan dari masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari tingkat pendapatan, konsumsi atau pengeluaran masyarakat, keadaan tempat tinggal atau fasilitas yang dimiliki, kesehatan anggota keluarga dan tingkat pendidikan dari anggota keluarga masyarakat.

Aspek-aspek spesifik yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah:²⁴

- 1) Kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan fertilitas.
- 2) Kesehatan, yang meliputi tingkat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita.
- 3) Pendidikan, yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas Pendidikan.

²⁴ Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*, (Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2006), h. 28.

- 4) Ketenagakerjaan, yang meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja dan pekerjaan anak.
- 5) Pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, yang meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan).
- 6) Perumahan dan lingkungan, yang meliputi kualitas rumah, fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan.
- 7) Sosial budaya, yang meliputi akses untuk memperoleh informasi dan hiburan serta kegiatan sosial budaya.

5. Ekonomi Islam

a. Definisi Ekonomi Islam

Kata Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga, sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relative tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau *iqtishad* berasal dari kata “*qosdun*” yang berarti keseimbangan dan keadilan.²⁵

Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang

²⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 2.

sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro dan ekologis.²⁶

Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Ekonomi syariah berbicara masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba allah untuk mencapai falah didunia dan akhirat.²⁷ Dari berbagai pengertian mengenai Ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah Ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dengan berlandaskan ajaran Islam yang mencegah ketidakadilan agar manusia dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

Secara garis besar sistem ekonomi di dunia hanya ada tiga, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas.²⁸

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan suatu kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah yang

²⁶ M Umer Chapra, *What is Islamic Economics, IDB Prize Winner's Lecture Series No. 9*, (Jedda: Islamic Development Bank, 1996), h. 33.

²⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar) Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 23.

²⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi Pertama, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 11.

berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam.

1) Prinsip Keadilan

Adil dalam terminology fikih adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai'fi mahallih*).²⁹ Yang dimaksud dengan landasan keadilan yaitu bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh paham keadilan dengan menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a) Riba

Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Islam melarang riba dengan segala bentuknya karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan.

b) Maysir

Islam melarang segala bentuk perjudian atau segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan, hal tersebut karena judi dan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa kepada kemudharatan yang sangat besar, yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan.

c) Gharar

²⁹ Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1, No.1, 2015, h. 78.

Gharar baik dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung gharar dimana karena gharar terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.

d) Haram

Jenis dan bentuk lembaga dengan segala produknya, yang berkembang, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Larangan dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material (materi, zat atau bendanya) dan larangan disebabkan faktor eksternal.

2) Prinsip Kemaslahatan

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaran, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial.³⁰ Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas termasuk lingkungan.

3) Prinsip Amanah

³⁰ Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", h. 81.

Amanah adalah pesan yang ditiptkan kepada orang lain untuk disampaikan, selain itu juga merupakan keamanan, ketentraman, dan kepercayaan.³¹ Sifat amanah adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, terlebih untuk pengusaha muslim.³² Amanah bukan hanya dapat dipercaya tetapi juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, , karena dilandasi oleh sikap percaya dan besarnya rasa tanggung jawab pada kewajiban yang dibebankan.

4) Prinsip Tanggung Jawab

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan, yaitu terdapat dua aspek, pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifan manusia yang keberadaannya sebagai wakil Allah di muka bumi, kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampur dengan pemaksaan yang ditolak sepenuhnya oleh agama Islam.³³

5) Prinsip Kejujuran

Kejujuran memiliki nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif, dan akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain dan dapat memberikan dampak positif, karena semua muamalat dalam Islam akan sempurna bila bersifat jelas, tenang, jauh dari praktik-praktik penipuan, pemalsuan dan yang lainnya.³⁴

C. Kerangka Konseptual

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 48.

³² Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 52.

³³ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, h. 419.

³⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 199.

Berdasarkan pengertian diatas, maka kerangka konseptual yang dimaksud yaitu Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul, yaitu pemanfaatan program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kupa perspektif ekonomi Islam., maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan sumber alam untuk pembangunan.³⁵ Pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengukur pengaruh sejauh mana tingkat pemanfaatan program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kupa perspektif ekonomi Islam.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, Sentosa, Makmur serta selamat terlepas dari segala macam gangguan, sehingga kesejahteraan diartikan sebagai sebuah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, serta ketentraman.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kesejahteraan perspektif Islam

3. Perspektif Ekonomi Islam

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dasar>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2021.

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1284.

Menurut KBBI perspektif adalah satu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tingginya); 2 sudut pandang; pandangan³⁷.

Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.³⁸

Perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sudut pandang terhadap fenomena yang terjadi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini akan dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.³⁹ Kerangka fikir harus diuraikan dengan jelas dan juga logis yang memuat tujuan penelitian, sasaran dan kesimpulan.

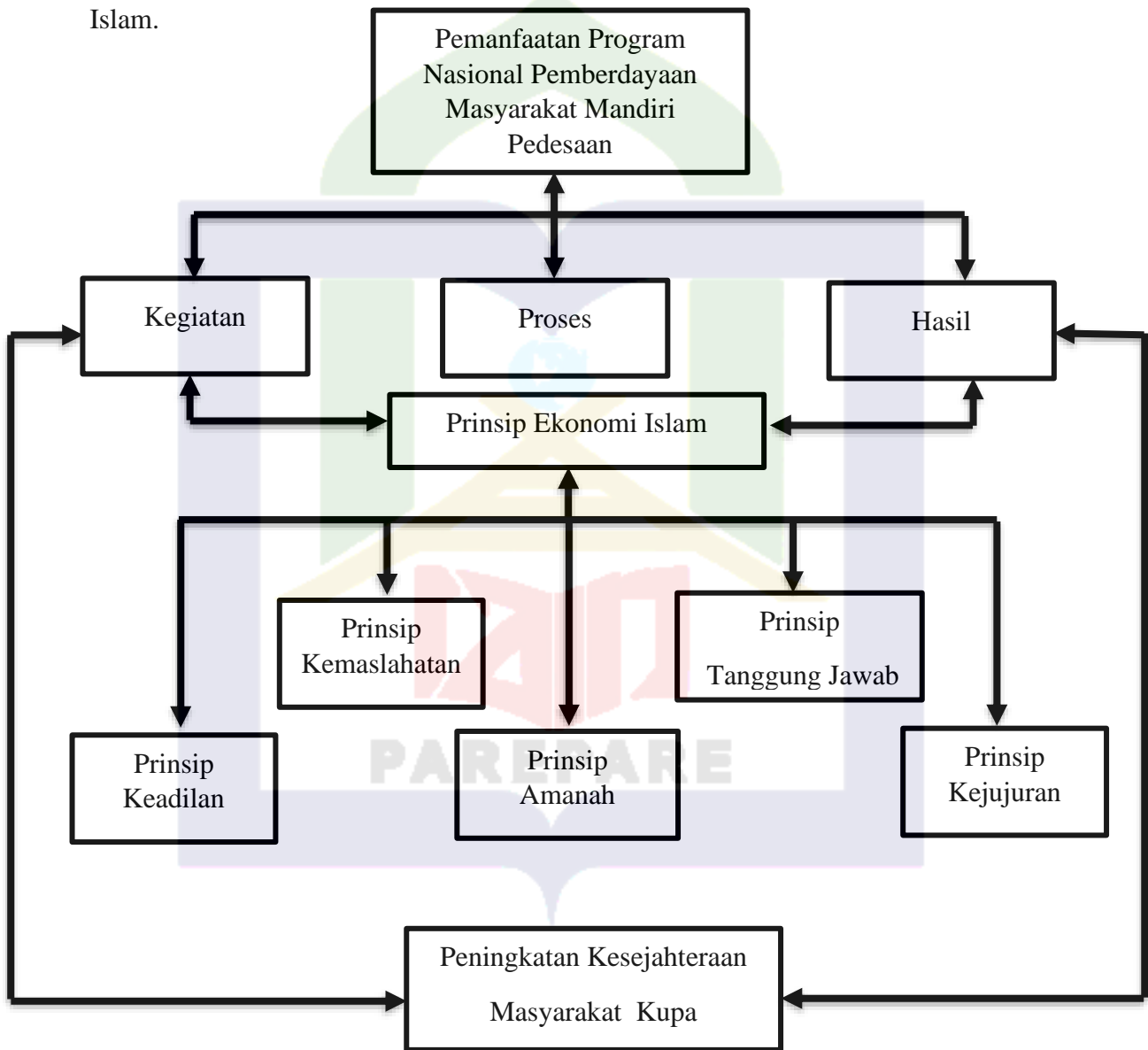
Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah mengukur tingkat pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kupa yang ditinjau dengan perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini menggunakan

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi III*, h. 1062

³⁸ M. Umer Chapra dalam *"The Future of Economic: an Islamic Perspektif"*, yang dikutip Kembali oleh Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 7.

³⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 75.

metode analisis kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskriptif mengenai pemanfaatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, dengan tiga indikator utama yang menjadi acuan peneliti yaitu kegiatan, proses, dan hasil dengan menggunakan prinsip ekonomi Islam.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan gambaran kerangka fikir diatas, penelitian ini memberikan gambaran umum tentang pemanfaatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dengan mengidentifikasi kegiatan, proses dan hasil kerja untuk mendapatkan gambaran mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian, pencapaian dan hasil dari pemafaatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

